

# Profil Data Terpilah Gender Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang

## Analisis Kesenjangan antara Realitas Statistik dan Kerangka Kebijakan

### Bagian 1: Konteks Sosio-Ekonomi dan Demografi Gender di Kabupaten Bengkayang

Untuk memahami secara komprehensif peran dan posisi perempuan dalam sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang, analisis harus dimulai dari konteks demografi dan sosial-ekonomi yang lebih luas. Data menunjukkan sebuah gambaran yang kompleks: di satu sisi, indikator sosial menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender, namun di sisi lain, data ekonomi memperlihatkan disparitas yang signifikan. Kesenjangan inilah yang menjadi fondasi untuk menganalisis tantangan dan peluang bagi perempuan di sektor pertanian.

#### 1.1. Lanskap Demografis: Komposisi Populasi dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten Bengkayang memiliki total populasi yang tercatat sebanyak 298.979 jiwa pada akhir tahun 2024. Data dari tahun sebelumnya, 2023, menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 108, yang berarti terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Angka ini mengindikasikan surplus populasi laki-laki, sebuah ketidakseimbangan demografis yang menjadi latar belakang krusial untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan struktur sosial. Rasio jenis kelamin yang tidak seimbang dapat memengaruhi pembentukan rumah tangga pertanian, ketersediaan tenaga kerja untuk berbagai jenis pekerjaan, dan norma-norma sosial yang mengatur peran gender dalam kegiatan ekonomi.

#### 1.2. Indikator Kesejahteraan Terpilah Gender: Paradoks Pemberdayaan dan Partisipasi

Sebuah paradoks yang mencolok muncul saat membandingkan indikator pemberdayaan sosial dengan partisipasi ekonomi perempuan di Bengkayang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026 menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020: TPAK laki-laki mencapai 87,24%,

sementara TPAK perempuan hanya 63,29%. Perbedaan ini menegaskan bahwa laki-laki secara statistik diakui sebagai penopang utama ekonomi rumah tangga.

Namun, pada saat yang sama, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 tercatat sangat tinggi, yaitu 71,96. Angka ini menempatkan Bengkayang pada peringkat kedua dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dan bahkan melampaui rata-rata capaian IPG provinsi. IPG yang tinggi umumnya mengindikasikan partisipasi perempuan yang relatif baik dalam kehidupan politik, peran publik, serta porsi yang layak dalam jabatan profesional dan teknis.

Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah IPG yang tinggi secara akurat mencerminkan realitas ekonomi mayoritas perempuan, terutama mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dan bergantung pada sektor pertanian? Terdapat kemungkinan bahwa metrik IPG, yang berfokus pada representasi di sektor formal dan posisi kepemimpinan, belum sepenuhnya menangkap realitas hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam angkatan kerja informal yang lebih luas.

### **1.3. Tinjauan Makroekonomi: Kemiskinan, Stunting, dan Isu Strategis dalam Lensa Gender**

Kondisi makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat memberikan konteks lebih lanjut terhadap urgensi pemberdayaan ekonomi perempuan. Tingkat kemiskinan di Bengkayang tercatat sebesar 6,03% pada tahun 2023. Selain itu, isu yang lebih mengkhawatirkan adalah angka stunting yang tinggi, yang tercatat sebesar 30,1% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dokumen RPJMD sendiri mengakui bahwa status gizi masyarakat yang rendah, termasuk stunting, merupakan salah satu permasalahan pembangunan utama di daerah tersebut.

Tingkat stunting yang tinggi secara intrinsik terkait dengan kesehatan dan gizi ibu, ketahanan pangan rumah tangga, serta akses perempuan terhadap sumber daya, pengetahuan, dan layanan kesehatan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi juga merupakan strategi krusial untuk perbaikan kesejahteraan generasi mendatang. Ketika partisipasi ekonomi perempuan rendah (seperti yang ditunjukkan oleh TPAK), kemampuan mereka untuk memastikan gizi yang cukup bagi diri sendiri dan anak-anak mereka menjadi terbatas. Dengan demikian, meningkatkan peran perempuan di sektor pertanian—yang merupakan sumber utama pangan dan pendapatan bagi mayoritas penduduk—menjadi jalur langsung untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting secara simultan.

## **Bagian 2: Partisipasi Gender di Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan**

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Bengkayang. Analisis mendalam terhadap partisipasi gender dalam sektor ini mengungkap sebuah realitas di mana perempuan memainkan peran yang sangat vital, namun kontribusi mereka sering kali tidak terhitung dalam statistik resmi, sebuah fenomena "statistical invisibility" atau ketidaktampakan statistik.

## 2.1. Struktur Tenaga Kerja Pertanian: Analisis Mendalam Data BPS

Sektor pertanian, yang mencakup perkebunan dan kehutanan, adalah lapangan pekerjaan utama bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Data menunjukkan bahwa 118 dari 124 desa/kelurahan di kabupaten ini mengandalkan sektor tersebut sebagai fokus ekonomi utama. Meskipun data tenaga kerja pertanian terpilah gender secara spesifik untuk tingkat Kabupaten Bengkayang tidak tersedia secara langsung dalam dokumen yang dianalisis, publikasi BPS di tingkat provinsi, seperti "Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka," mengonfirmasi adanya tabel statistik mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin. Selain itu, publikasi nasional seperti "Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian" menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis pekerja perempuan di berbagai subsektor, termasuk peternakan dan perkebunan.

Mengingat ketiadaan data di tingkat kabupaten, laporan ini akan menggunakan data proksi dari tingkat provinsi untuk memodelkan estimasi distribusi tenaga kerja di Bengkayang. Langkah ini diambil untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai skala keterlibatan perempuan, sambil secara eksplisit mengakui hal ini sebagai kesenjangan data kritis yang perlu diatasi oleh BPS Kabupaten Bengkayang. Penggunaan proksi ini memungkinkan visualisasi skala partisipasi perempuan yang signifikan, yang menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut mengenai peran dan kontribusi mereka.

**Tabel 1: Estimasi Penduduk Usia 15+ yang Bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Subsektor di Kabupaten Bengkayang (Berdasarkan Proksi Data Provinsi)**

Subsektor	Jumlah Pekerja Laki-laki (Estimasi)	Jumlah Pekerja Perempuan (Estimasi)	Total Pekerja (Estimasi)	Persentase Pekerja Perempuan
<b>Tanaman Pangan</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
<b>Hortikultura</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
<b>Perkebunan</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
<b>Peternakan</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia

<b>Kehutanan</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
<b>Perikanan</b>	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
<b>Total</b>	<b>Data tidak tersedia</b>	<b>Data tidak tersedia</b>	<b>Data tidak tersedia</b>	<b>Data tidak tersedia</b>

Catatan: Tabel ini bersifat ilustratif untuk menunjukkan kerangka analisis yang diperlukan. Data spesifik perlu diisi menggunakan publikasi BPS "Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka" dan "Hasil Sensus Pertanian 2023". Ketiadaan data ini dalam sumber yang dianalisis menyoroti kesenjangan informasi yang krusial.

## 2.2. Pembagian Peran: Divisi Kerja antara Laki-laki dan Perempuan

Penelitian kualitatif di wilayah yang berdekatan dan memiliki karakteristik sosial-budaya serupa, seperti Kabupaten Sambas (daerah asal pemekaran Kabupaten Bengkayang), memberikan model yang berguna untuk memahami pembagian kerja berdasarkan gender. Studi menunjukkan bahwa perempuan sangat terlibat dalam berbagai tahapan siklus produksi pertanian, seperti menanam (

*nandor*), meniangi gulma, dan memanen (*pengatam*), yang sering kali dilakukan melalui sistem kerja komunal atau gotong royong (*belallek*).

Meskipun peran mereka sangat krusial, pekerjaan perempuan sering terkonsentrasi pada aktivitas yang bersifat subsisten, padat karya, dan merupakan tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labor*). Sebaliknya, laki-laki cenderung lebih mendominasi aktivitas yang melibatkan penggunaan teknologi (seperti penggunaan alat semprot) dan interaksi dengan pasar, termasuk penjualan hasil panen. Pembagian kerja semacam ini tidak hanya memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan, tetapi juga membuat kontribusi mereka menjadi kurang terlihat dalam perhitungan ekonomi moneter.

Fenomena ini menjelaskan paradoks yang ditemukan pada Bagian 1. Meskipun perempuan bekerja berjam-jam di lahan pertanian, kontribusi mereka yang sangat besar terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan operasional usaha tani sering kali tidak memenuhi ambang batas definisi "bekerja" dalam survei ketenagakerjaan formal seperti Sakernas, yang sering kali mensyaratkan adanya upah atau keuntungan. Akibatnya, kerja keras mereka tidak tercermin dalam statistik TPAK, yang mengarah pada undervaluasi sistematis terhadap kontribusi ekonomi perempuan di sektor pertanian. Ini berarti kebijakan dan program yang dirancang berdasarkan statistik tenaga kerja resmi berisiko salah sasaran karena tidak selaras dengan realitas di lapangan.

## Bagian 3: Kerangka Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian

Analisis terhadap dokumen perencanaan strategis utama Kabupaten Bengkayang, yaitu RPJMD, sangat penting untuk memahami bagaimana visi pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam strategi dan target pembangunan. Pemeriksaan kritis terhadap dokumen ini mengungkap adanya diskoneksi struktural antara tujuan umum kesetaraan gender dengan strategi spesifik yang dirancang untuk sektor pertanian.

### 3.1. Dekonstruksi RPJMD Kabupaten Bengkayang (2021-2026): Visi dan Misi Pertanian

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk periode 2021-2026 adalah "KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA". Visi ini dijabarkan ke dalam beberapa misi, di mana Misi 4 secara khusus didedikasikan untuk sektor pertanian, yaitu "Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan..." dengan tujuan utama "mendorong peningkatan produksi dan produktivitas".

Dokumen RPJMD menguraikan berbagai strategi untuk mencapai misi ini, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani, optimalisasi penggunaan teknologi, dan perbaikan akses pasar. Namun, bahasa kebijakan yang digunakan secara konsisten berpusat pada produksi (

*production-centric*). Fokusnya adalah pada hasil akhir (output) dan kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Unsur manusia dalam kerangka ini didefinisikan secara umum sebagai "SDM petani," tanpa diferensiasi atau pengakuan lebih lanjut terhadap keragaman aktor di dalamnya, termasuk perempuan.

### 3.2. Mengidentifikasi Kesenjangan Kebijakan: Absennya Target dan Indikator Spesifik Gender

Kesenjangan paling kritis dalam RPJMD terletak pada ketiadaan target dan indikator yang terpilah berdasarkan gender untuk Misi 4 yang berfokus pada pertanian. Tinjauan mendalam terhadap dokumen ini menunjukkan bahwa indikator kinerja utama untuk sektor pertanian bersifat agregat dan buta gender (*gender-blind*). Contohnya termasuk "Kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan terhadap total PDRB (%)" dan target umum untuk "PDRB per kapita".

Hal ini sangat kontras dengan bagian lain dalam dokumen RPJMD yang sama, khususnya yang membahas kesejahteraan sosial. Pada bagian tersebut, pemerintah daerah menunjukkan kapasitas dan kesadaran untuk menggunakan data terpilah gender. Misalnya, data Angka Melek Huruf (AMH) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disajikan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan dokumen tersebut secara eksplisit mengakui adanya disparitas.

Inkonsistensi internal ini merupakan temuan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kemampuan teknis dan kesadaran konseptual mengenai pentingnya analisis gender di sektor sosial, lensa yang sama tidak diterapkan pada sektor ekonomi yang paling vital bagi mayoritas penduduknya. Kesetaraan gender diakui secara prinsipil, namun diabaikan dalam praktik perumusan strategi ekonomi inti.

Kegagalan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pertanian pada level RPJMD menciptakan siklus ketidaktampakan yang berkelanjutan. RPJMD adalah dokumen perencanaan tertinggi yang menjadi acuan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama lima tahun. Indikator yang tercantum di dalamnya mendefinisikan "keberhasilan" dan menjadi dasar untuk alokasi anggaran serta evaluasi kinerja. Ketika indikator untuk sektor pertanian hanya berfokus pada produksi dan PDRB tanpa pemilahan gender, maka dinas teknis pelaksana (seperti Dinas Pertanian) tidak memiliki mandat atau insentif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terpilah gender. Akibatnya, tidak ada data yang dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan yang lebih responsif gender di masa depan, dan ketidaktampakan perempuan dalam perencanaan pembangunan pertanian menjadi terlembagakan.

## **Bagian 4: Analisis Berbasis Gender terhadap Program dan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Analisis pada tingkat operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (selanjutnya disebut Dinas Pertanian) memperlihatkan bagaimana kesenjangan kebijakan yang teridentifikasi dalam RPJMD termanifestasi dalam implementasi program dan praktik pelaporan. Meskipun ada pengakuan terhadap kelompok perempuan di tingkat perencanaan strategis, hal ini tidak tercermin dalam kerangka akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

### **4.1. Rencana Strategis (Renstra): Pengakuan terhadap Kelompok Wanita Tani**

Pada tingkat perencanaan operasional, terdapat sinyal positif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan periode 2021-2026 secara eksplisit mengakui keberadaan dan peran **Kelompok Wanita Tani (KWT)**. Dokumen

Renstra menyatakan bahwa pengelompokan petani ke dalam wadah Kelompok Tani (Poktan) dan KWT bertujuan untuk "memudahkan pembinaan, transfer teknologi, dan penyampaian informasi". Selain itu, Renstra juga mencantumkan program "Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan," sebuah inisiatif yang selaras dengan program nasional Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang sering kali menargetkan perempuan dan rumah tangga sebagai penerima manfaat utama.

Pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran di tingkat dinas mengenai KWT sebagai entitas yang berbeda dan penting. Ini adalah sebuah kemajuan dibandingkan dengan pendekatan buta gender pada level RPJMD. Namun, pertanyaan krusial berikutnya adalah apakah pengakuan ini diterjemahkan ke dalam alokasi sumber daya yang spesifik dan, yang lebih penting, ke dalam sistem pemantauan kinerja yang terpisah.

#### 4.2. Studi Kasus Program: Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan KWT

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan salah satu inisiatif paling konkret dan sensitif gender dalam portofolio Dinas Pertanian. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan pangan, dan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan pedoman teknis nasional, program P2L menyalurkan bantuan pemerintah secara langsung kepada kelompok masyarakat, yang dapat mencakup dana sebesar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta untuk tahap penumbuhan dan Rp 15 juta untuk tahap pengembangan. Dana ini digunakan untuk pembangunan rumah bibit, pengembangan demplot, dan pembelian sarana produksi lainnya. Laporan berita dari Kabupaten Bengkayang mengonfirmasi peluncuran program P2L yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan tokoh masyarakat, menunjukkan komitmen untuk implementasi di tingkat lokal.

Meskipun KWT bukan satu-satunya penerima manfaat program P2L secara nasional, mereka secara konsisten menjadi salah satu target utama. Program ini secara strategis menasar domain tradisional perempuan (pekarangan rumah) dan berupaya mentransformasikannya menjadi unit produksi ekonomi yang lebih formal dan produktif. Analisis terhadap implementasi P2L di Bengkayang dapat menjadi model potensial untuk pengembangan pertanian yang lebih responsif gender secara lebih luas.

**Tabel 2: Analisis Komparatif Kelompok Tani Umum (Poktan) vs. Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Karakteristik Kunci	Kelompok Tani (Poktan - Umum)	Kelompok Wanita Tani (KWT)
<b>Keanggotaan Tipikal</b>	Didominasi oleh laki-laki, sering kali kepala keluarga atau pemilik lahan.	Seluruhnya atau mayoritas adalah perempuan, termasuk istri petani atau perempuan kepala keluarga.

<b>Tujuan Utama</b>	Fokus pada peningkatan produksi komoditas utama di lahan usaha tani (sawah, kebun).	Fokus pada pemanfaatan lahan pekarangan, ketahanan pangan keluarga, gizi, dan sering kali pengolahan hasil pertanian.
<b>Aktivitas Umum</b>	Budidaya tanaman skala luas (padi, jagung, sawit), pengelolaan irigasi, penggunaan alsintan besar.	Budidaya hortikultura (sayuran, toga), peternakan skala kecil (unggas), pengolahan pascapanen menjadi produk bernilai tambah, dan pemenuhan gizi keluarga.
<b>Akses Sumber Daya</b>	Cenderung memiliki akses lebih baik ke lahan yang lebih luas, kredit formal, dan teknologi pertanian skala besar.	Seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap lahan, modal, dan informasi. Sangat bergantung pada program bantuan pemerintah.
<b>Jenis Dukungan Pemerintah</b>	Bantuan benih/pupuk untuk komoditas utama, alsintan (traktor), penyuluhan teknis budidaya.	Bantuan untuk program P2L, pelatihan pengolahan hasil, bibit hortikultura, alat pengolahan skala rumah tangga.

Sumber: Sintesis dari berbagai sumber.

### 4.3. Evaluasi Kinerja (LAKIP 2023): Ketidaktampakan KWT dalam Pelaporan

Konsekuensi langsung dari kesenjangan kebijakan di tingkat RPJMD terlihat jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian tahun 2023. Laporan ini, sebagai dokumen akuntabilitas utama, mengukur kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Untuk sasaran yang terkait dengan kelembagaan petani, LAKIP 2023 melaporkan capaian indikator "Jumlah Kelembagaan Petani (Poktan)." Data menunjukkan realisasi sebanyak 1.879 kelompok dari target 1.572 kelompok, atau sebuah pencapaian sebesar 119,53%.

Masalahnya adalah, laporan tersebut **tidak menyediakan data terpilah** untuk KWT. Kelompok perempuan ini digabungkan di bawah satu indikator agregat "Kelembagaan Petani". Akibatnya, menjadi tidak mungkin untuk mengevaluasi kinerja program yang spesifik menysasar perempuan. Beberapa pertanyaan kritis tidak dapat dijawab:

- Dari total 1.879 kelembagaan petani tersebut, berapa jumlah KWT?
- Apakah KWT menerima porsi sumber daya (anggaran, pelatihan, bantuan) yang proporsional?

- Bagaimana tingkat keberhasilan dan keberlanjutan KWT dibandingkan dengan Poktan yang didominasi laki-laki?

Keberhasilan, tantangan, dan kontribusi KWT menjadi tidak terlihat secara statistik dalam dokumen pertanggungjawaban resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan fundamental antara *strategi yang dinyatakan* (mengakui KWT dalam Renstra) dengan *praktik akuntabilitas* (mengabaikan KWT dalam LAKIP). Ini menyiratkan bahwa inisiatif yang berfokus pada gender, seperti dukungan untuk KWT, mungkin diperlakukan sebagai kegiatan tambahan ("add-on") dan bukan sebagai bagian inti dari mandat utama dinas yang berorientasi pada produksi. Selama akuntabilitas diukur dengan metrik buta gender, insentif struktural untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dan memantau dampak program terhadap perempuan akan tetap lemah.

## Bagian 5: Sintesis, Wawasan Kunci, dan Rekomendasi Strategis

Analisis data terpilah gender di sektor pertanian Kabupaten Bengkayang, dari level makro kebijakan hingga implementasi program, mengungkap serangkaian temuan yang saling terkait. Bagian ini mensintesis temuan-temuan utama tersebut dan merumuskan rekomendasi strategis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk berbagai tingkat pemerintahan.

### 5.1. Sintesis Temuan Utama: Paradoks Partisipasi Tinggi dan Visibilitas Rendah

Kesimpulan utama dari laporan ini adalah adanya sebuah paradoks: **perempuan merupakan aktor yang krusial dan memiliki partisipasi tinggi dalam aktivitas pertanian di Kabupaten Bengkayang, namun mereka sebagian besar tidak terlihat (invisible) dalam statistik ekonomi resmi, dokumen perencanaan strategis, dan laporan kinerja pemerintah.** Ketidaktampakan ini bukan hanya masalah representasi data, tetapi juga menciptakan siklus berkelanjutan yang menghambat investasi, membatasi akses perempuan terhadap sumber daya, dan pada akhirnya mengurangi potensi sektor pertanian secara keseluruhan.

### 5.2. Wawasan Berlapis: Implikasi Ekonomi, Sosial, dan Institusional

Temuan-temuan dalam laporan ini memiliki implikasi yang berlapis:

- **Implikasi Ekonomi:** Ketidaktampakan statistik kontribusi ekonomi perempuan (seperti yang tercermin dalam TPAK yang rendah) menyebabkan undervaluasi terhadap peran mereka dalam ketahanan pangan rumah tangga dan ekonomi lokal. Ini berisiko pada alokasi sumber daya yang tidak efisien, di

mana investasi lebih banyak diarahkan pada aktivitas yang didominasi laki-laki, sementara aktivitas vital yang dilakukan perempuan (pengolahan pascapanen, budidaya pekarangan) kurang mendapat dukungan.

- **Implikasi Sosial:** Kesenjangan antara IPG yang tinggi dan TPAK perempuan yang rendah menunjukkan bahwa pemberdayaan di ranah publik dan politik belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga. Hal ini dapat melanggengkan ketergantungan ekonomi dan membatasi daya tawar perempuan. Lebih jauh, kondisi ini memiliki korelasi kuat dengan isu kesejahteraan mendasar seperti tingginya angka stunting, yang sangat dipengaruhi oleh status gizi dan pemberdayaan ibu.
- **Implikasi Institusional:** Kesenjangan kebijakan antara RPJMD yang buta gender (di sektor pertanian) dan Renstra Dinas Pertanian yang lebih sadar gender menciptakan inersia institusional. Tanpa mandat yang jelas dari dokumen perencanaan tertinggi (RPJMD), program-program yang berfokus pada perempuan seperti dukungan untuk KWT akan tetap bersifat perifer dan keberhasilannya tidak akan terukur dalam kerangka akuntabilitas utama pemerintah daerah.

### 5.3. Rekomendasi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sebagai ujung tombak implementasi, Dinas Pertanian dapat mengambil langkah-langkah segera untuk mengatasi kesenjangan ini:

- **Data dan Pelaporan:**
  1. **Disagregasi Indikator Kinerja:** Secara proaktif, mulai memilah indikator "Jumlah Kelembagaan Petani" dalam semua sistem pemantauan internal dan dalam penyusunan LAKIP berikutnya menjadi dua kategori terpisah: "Jumlah Kelompok Tani (Poktan)" dan "Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)."
  2. **Membangun Data Dasar (Baseline):** Melakukan pemetaan atau sensus cepat terhadap seluruh KWT yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk membangun data dasar yang valid mengenai jumlah anggota, jenis kegiatan, aset yang dimiliki, dan kebutuhan spesifik mereka.
- **Desain dan Implementasi Program:**
  1. **Menetapkan Target SMART untuk KWT:** Dalam revisi Renstra berikutnya, menetapkan target yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbasis Waktu (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* - SMART) untuk pengembangan KWT. Contoh: "Meningkatkan jumlah KWT aktif sebesar 15% pada tahun 2028" atau "Memastikan minimal 30% dari total peserta pelatihan teknis pertanian adalah perempuan."

2. **Meninjau Mekanisme Bantuan:** Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan pemerintah (benih, pupuk, alat dan mesin pertanian/alsintan) untuk memastikan skema tersebut aksesibel dan sesuai dengan kebutuhan KWT, yang mungkin memerlukan peralatan skala lebih kecil dan fokus pada komoditas hortikultura.
- **Penguatan Kelembagaan:**
    1. **Program Peningkatan Kapasitas:** Mengembangkan modul pelatihan khusus untuk KWT yang tidak hanya berfokus pada teknik produksi, tetapi juga mencakup literasi keuangan, manajemen usaha, pemasaran digital, dan kepemimpinan untuk mendorong kemandirian ekonomi.

#### **5.4. Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Bappeda dan BPS)**

Perubahan yang sistemik dan berkelanjutan memerlukan intervensi di tingkat kebijakan dan pengumpulan data yang lebih tinggi:

- **Kebijakan dan Perencanaan (Bappeda):**
  1. **Integrasi Gender dalam RPJMD:** Mengintegrasikan indikator kinerja terpilah gender ke dalam Misi 4 (Pertanian) pada revisi RPJMD berikutnya. Keberhasilan sektor pertanian harus diukur tidak hanya dari kontribusinya terhadap PDRB, tetapi juga dari indikator seperti "penurunan kesenjangan pendapatan pertanian antara laki-laki dan perempuan" atau "peningkatan kepemilikan aset pertanian oleh perempuan."
  2. **Mewajibkan Anggaran Responsif Gender (ARG):** Menerapkan kerangka Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai syarat wajib bagi semua OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih adil.
- **Pengumpulan Data (BPS Kabupaten Bengkayang):**
  1. **Publikasi Data Terpilah:** Memprioritaskan pengolahan dan publikasi data ketenagakerjaan terpilah gender untuk sektor pertanian di tingkat kabupaten dalam publikasi tahunan "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka." Ketersediaan data resmi ini akan menjadi dasar bukti (*evidence-based*) yang kuat untuk perencanaan, advokasi, dan evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.